

MODEL PENGEMBANGAN PELABUHAN PUSAT KAJIAN UNGGULAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR (PKUD-PPMP) UNIVERSITAS PATTIMURA DI DESA HILA-MALUKU

Ruth P. Soumokil^{1)*}

Jurusan Teknik Perkapalan Universitas Pattimura
Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka, Teluk Ambon, Maluku, Indonesia
Email: ut.soumokil@gmail.com

Abstrak Pelabuhan Pusat Kajian Unggulan Daerah dan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PKUD-PPMP) Unpatti yang berlokasi di Hila, merupakan salah satu pelabuhan yang strategis karena dirancang untuk mengintegrasikan pengembangan usaha perikanan yang terdiri dari 4 mitra yakni Pemerintah, Akademik, Usaha dan Masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan usaha perikanan, oleh karena itu dibutuhkan suatu model konseptual yang integrative yang dapat dijadikan acuan untuk pengembangan Pelabuhan PKUD-PPMP untuk menunjang kemajuan perikanan tangkap ke depan. Paper ini bertujuan untuk membuat model konseptual pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi di Desa Hila berdasarkan Aspek Fasilitas Pokok yang tersedia pada Pelabuhan PKUD-PPMP tersebut. Analisis Data dilakukan dengan menggunakan Pendekatan *Soft System Methodology (SSM)* yang dilakukan melalui beberapa tahap yaitu : situasi masalah; pemaparan situasi masalah yang hasilnya digambarkan dengan *rich picture*; menetapkan *root definitions* untuk mengatasi permasalahan yang telah dirumuskan; membuat model konseptual berdasarkan *root definitions*. Dari hasil Penelitian didapat bahwa Pengembangan Pelabuhan PKUD-PPMP harus menitik beratkan pada : Penambahan Fasilitas *Bollard* untuk mempermudah pendaratan ikan, pemanfaatan dermaga dan kolam pelabuhan oleh nelayan sekitar Pelabuhan, pengadaan fasilitas *Cold Storage*, perbaikan jalan dari dan menuju pelabuhan untuk memperlancar transportasi darat, membuka jalur-jalur keterikantan dengan pasar yang ada.

Kata Kunci : Pelabuhan, Infrastruktur Pelabuhan, *Soft System Methodology*

Abstrac. *The Unpatti Center for Regional Excellence in Research and Development of Coastal Community Empowerment (PKUD-PPMP), which is located in Hila, is a strategic port because it is designed to integrate the development of fisheries business which consists of 4 dimensions, namely Government, Academic, Business and Community. This collaboration is expected to make a positive contribution to the development of fisheries businesses, therefore an integrative conceptual model is needed that can be used as a reference for the development of the PKUD-PPMP Port to support the progress of capture fisheries in the future. This research aims to create a conceptual model for the development of an integrated fishing port in Hila Village based on the Basic Facilities Aspects available at the PKUD-PPMP Port. Data analysis was carried out using the Soft System Methodology (SSM) approach which was carried out through several stages, namely: 1. understanding the problem situation; 2. presentation of the problem situation with the results depicted in a rich picture; 3. establish root definitions to address the problems that have been formulated; 4. create a conceptual model based on root definitions. From the research results, it was found that the development of the PKUD-PPMP Port must focus on:*

Adding Bollar Facilities to make it easier to land fish, Utilizing the Pier and Port pools by Fishermen around the Port, Procuring Cold Storage Facilities, Repairing Roads to and from the Port to facilitate Land Transportation, Opening routes of engagement with existing markets.

Keywords : Port, Port Infrastructure, Soft System Methodology

Penulis korespondensi, HP: +62 82199793176
Email: ut.soumokil@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Total potensi perikanan nasional Indonesia adalah 12.541.431 ton/tahun, dimana total potensi perikanan Maluku adalah sebesar 4.669.030 ton/tahun atau sebesar 37,23% dari Potensi Perikanan Nasional. [1]. Dalam rangka menggali potensi perikanan tersebut, sekaligus untuk menumbuh kembangkan usaha di bidang perikanan, maka diperlukan tersedianya prasarana untuk tempat berlabuh atau berlindung bagi kapal-kapal perikanan (*Fishing Base*)[2] dan mendaratkan ikan hasil tangkapannya. Prasarana yang dimaksud adalah berupa Pelabuhan Perikanan (PP) atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagai tempat atau pangkalan bagi kapal-kapal perikanan.

Pelabuhan Perikanan berfungsi untuk memperlancar operasi penangkapan ikan, pendaratan hasil tangkapan pengolahan ikan sampai pada tahap pemasaran[3]. Karenanya Pelabuhan Perikanan dituntut memiliki Fasilitas yang optimal guna mendukung keseluruhan Operasi di atas, dengan harapan kesejahteraan nelayan dapat terwujud.

Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan [4]. Menurut Dirjen Perikanan Tangkap (2002) [5], antara kapal perikanan dan pelabuhan perikanan

terdapat hubungan fungsional yang sangat erat dalam bentuk saling ketergantungan. Bisa dikatakan bahwa pelabuhan perikanan merupakan fungsi dari kapal perikanan, yang berarti bahwa pelabuhan perikanan harus bisa mengantisipasi perkembangan perikanan tangkap, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dikatakan bahwa pelabuhan mempunyai daya dukung yang baik apabila fasilitas-fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan[6] mampu melayani satu siklus kegiatan, baik kegiatan operasional di laut/sungai maupun kegiatan operasional di darat.

Sehubungan dengan itu, maka Pelabuhan Pusat Kajian Unggulan Daerah dan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PKUD-PPMP) Unpatti yang berlokasi di Hila, merupakan salah satu pelabuhan yang strategis karena dirancang untuk mengintegrasikan pengembangan usaha perikanan yang terdiri dari 4 Mitra yakni Mitra Pemerintah, Mitra Akademik, Mitra Usaha/ Pengusaha dan Mitra Masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan usaha perikanan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu model konseptual yang integratif, yang dapat dijadikan acuan untuk pengembangan Pelabuhan PKUD-PPMP dan untuk menunjang kemajuan perikanan tangkap ke depan.

Pembangunan PKUD dan PPMP ini, bertujuan untuk menjawab kebutuhan tempat penelitian, dalam rangka pengembangan ilmu perikanan dan kelautan Unpatti sekaligus dapat

memberikan investasi dan spot-spot bisnis kepada Unpatti. Selain itu dengan adanya Pelabuhan PKUD-PPMP, maka kelancaran operasi kegiatan penangkapan, pendaratan, pengolahan dan pemasaran ikan diharapkan akan menjadi lebih mudah. Di samping itu seluruh kegiatan masyarakat nelayan akan dapat menjadi pintu gerbang yang berpengaruh positif terhadap daerah-daerah sekitarnya [7].

Dari Latar Belakang yang sudah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang ada yaitu : bagaimana kondisi eksisting Fasilitas Pokok di Pelabuhan PKUD-PPMP Universitas Pattimura di Desa Hila? Bagaimana Model Pengembangan PKUD-PPMP Universitas Pattimura di Desa Hila untuk menunjang kemajuan Perikanan?

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi fasilitas pokok yang tersedia di Pelabuhan PKUD-PPMP Universitas Pattimura di Desa Hila, Maluku Tengah dan untuk membuat model konseptual pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi di Desa Hila berdasarkan Aspek Fasilitas Pokok yang tersedia pada Pelabuhan PKUD-PPMP Universitas Pattimura di Desa Hila

Urgensi dari penelitian ini adalah mengingat besarnya Potensi Perikanan di Maluku dan semakin meningkatkannya kebutuhan akan adanya Pelabuhan Perikanan yang dapat menunjang operasional kapal-kapal perikanan, maka dibutuhkan suatu Model Pengembangan Pelabuhan Perikanan, dalam hal ini Fasilitas Pokok pada Pelabuhan PKUD-PPMP Universitas Pattimura di Desa Hila, agar dapat menunjang Peningkatan Perikanan di Maluku.

Pelabuhan pada Pusat Kajian Unggulan Daerah dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PKUD-PPMP) Unpatti terletak di Desa Hila. Adapun Desa Hila Terletak di pantai utara Pulau Ambon, di dataran rendah dan sedikit berbukit ke arah selatan menuju

Negeri Hative Besar di Kota Ambon dan berjarak sekitar 37 km dari pusat kota Ambon. Jumlah penduduk Desa Hila 1425 KK dan jumlah jiwa 6850. Presentasi pria dan wanita hampir seimbang yakni 55% - 45% [8]. Pada awalnya Pembangunan PKUD dan PPMP ini, bertujuan untuk kebutuhan tempat penelitian, dalam rangka pengembangan ilmu perikanan dan kelautan Universitas Pattimura.

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Pelabuhan perikanan menyediakan tempat bagi kapal-kapal ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan memberikan pelayanan yang diperlukan. Mengingat bahwa hasil tangkapan ikan adalah produk yang mudah busuk sehingga perlu penanganan secara cepat[9]. Di samping itu jumlah kapal yang berlabuh di pelabuhan bisa cukup banyak sehingga penggunaan fasilitas pelabuhan, terutama dermaga harus dilakukan seefisien mungkin. Pelabuhan ikan dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan dan kegiatan-kegiatan pendukungnya, seperti dermaga, bongkar muat barang, lahan parkir, jalan akses masuk, perkantoran untuk mengelola pelabuhan perikanan, pengisian bahan bakar dan sebagainya.

Soft System Methodology digunakan sebagai pendekatan untuk mengatasi permasalahan yang kompleks. Pendekatan *Soft System Methodology* dianggap sebagai metodologi yang sangat produktif untuk mempelajari setiap aktivitas manusia yang terorganisir dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu [10].

2 METODE

2.1. Tata Ruang Pelabuhan Perikanan

Tata ruang pelabuhan perikanan dirumuskan berdasarkan pengelompokan jenis kegiatan sesuai dengan fungsi layanan dan jenis kegiatannya. Pengelompokan dimaksudkan untuk memberikan efisiensi gerak operasional di dalam pelabuhan maupun di kawasan sekitarnya. Pengelompokan kegiatan didasarkan pada fungsi layanan dan alur kegiatan.

Secara garis besar terdapat tiga kelompok kegiatan pelayanan, yakni : pelayanan kapal, pelayanan hasil tangkapan ikan dan pelayanan kegiatan manusia di dalam kawasan. Kelompok kegiatan tersebut dipisahkan berdasarkan jenis kegiatan spesifiknya di dalam satuan zonasi seperti ditunjukkan pada Tabel 1. [11] berikut ini :

Tabel 1. Zona Tata Ruang Pelabuhan Perikanan

Kapal	Fungsi Layanan	
	Hasil Tangkapan	Manusia
Zona kapal bongkar	Zona pelelangan	Zona publik/umum
1. Kelompok pelabuhan 2. Tambatan bongkar - Kapal 30 GT 3. Transit shed & MCK	1.Sorting, cleaning, weighting 2. Tempat pelelangan 3. Packing 4. Storing 5. Pabrik es/cold storage 6. Loading ke atas truk	1. Parkir kendaraan 2. Ruang transaksi lelang 3. MCK umum 4. Terminal angkutan 5. Tempat ibadah/mushola 6. Warung 7. Area wisata bahari 8. P3K
Zona tambat dan perbekalan	Zona olah tradisional	Zona administrasi
1. Tambatan	1. Pabrik es/cold	1. Kantor

- | | | |
|--|----------------|----------------------------|
| istirahat | <i>storage</i> | pelabuhan |
| 2. Tambatan muat | 2. Gudang | 2. Kantor syahbandar |
| 3. Tempat perbaikan jaring | 3. Pengasinan | 3. Kantor satpolair |
| 4. Gudang es | 4. Pengasapan | 4. Balai pertemuan nelayan |
| 5. Perbekalan (es, air bersih, bekal, BBM) | 5. Jemur | 5. KUD/koperasi mina |
| | 6. IPAL | 6. Gardu listrik/genset |
| | | 7. Sumur/tangki air |
| | | 8. Layanan BBM |
| | | 9. Pemadam kebakaran |

Zona reparasi	Zona industri	Zona penunjang
1. <i>Slipways</i> dengan <i>winch house</i> 2. Repair workshop 3. Elctronic & <i>refrig</i> 4. Gudang peralatan berat	1. Kawasan industri 2. Kawasan pergudangan 3. Kawasan pemasaran dan pertokoan.	1. Rumah dinas 2. Mes penginapan 3. Restoran /kantin 4. poliklinik

2.2 Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Menurut Lubis [12], kapasitas dan jenis fasilitas yang ada di suatu pelabuhan perikanan umumnya akan menentukan skala atau tipe dari suatu pelabuhan dan akan berkaitan pula dengan skala usaha perikananannya. Fasilitas-fasilitas tersebut selanjutnya akan berkembang sesuai dengan kemajuan usaha perikananannya. Berkembangnya fasilitas tersebut dapat berarti bertambahnya fasilitas baru dan atau bertambahnya kapasitas dari fasilitas yang telah ada. Dengan kata lain jenis dan kapasitas fasilitas yang telah ada berkembang sesuai dengan kebutuhan operasional pelabuhan.

Agar dapat berfungsi sesuai dengan peranannya, pelabuhan perikanan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Fasilitas-fasilitas tersebut berupa fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang[13]. Penyediaan fasilitas tersebut bertujuan agar dapat menampung kegiatan-kegiatan perikanan antara lain : Arus kapal-kapal perikanan yang keluar masuk pelabuhan, arus ikan yang diaratkan, diproses, disimpan dan dipasarkan domestik atau ekspor, arus manusia (nelayan, pedagang dan karyawan), dan arus alat transportasi yang keluar masuk pelabuhan.

a. Fasilitas Pokok

Fasilitas Pokok atau juga dikatakan infrastruktur adalah fasilitas dasar yang diperlukan dalam kegiatan di suatu pelabuhan. Fasilitas ini berfungsi untuk menjamin keamanan dan kelancaran kapal baik sewaktu berlayar keluar masuk pelabuhan maupun sewaktu berlabuh di pelabuhan. Fasilitas-fasilitas pokok tersebut antara lain terdiri dari: Dermaga, kolam pelabuhan, Alat bantu navigasi, dan pemecah gelombang (*Breakwater*)

b. Fasilitas Fungsional

Menurut Lubis [14] fasilitas fungsional dikatakan juga supstruktur adalah fasilitas yang berfungsi meninggikan nilai guna dari fasilitas pokok dengan cara memberikan pelayanan yang dapat menunjang aktifitas di pelabuhan. Fasilitas-fasilitas ini di antaranya tidak harus ada di pelabuhan namun fasilitas ini disediakan sesuai dengan kebutuhan operasional pelabuhan perikanan tersebut.

Fasilitas fungsional yang penting dan harus menyatu dengan daerah pelabuhan perikanan adalah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berfungsi sebagai tempat pemasaran hasil produksi perikanan dengan sistem lelang, sedangkan fasilitas-fasilitas lainnya seperti fasilitas pengolahan, penjemuran, pabrik es,

gudang pendingin (*Cold storage*), bengkel, slipway (*docking*) serta tempat pengisian perbekalan kapal tidak harus berada di dalam lingkup daerah pelabuhan dan sistem manajemennya bisa di luar manajemen pelabuhan.

c. Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang adalah fasilitas yang secara tidak langsung meningkatkan peranan pelabuhan atau para pelaku untuk mendapatkan kenyamanan dalam melakukan aktifitas di pelabuhan. Fasilitas penunjang terdiri dari fasilitas kesejahteraan (MCK, poliklinik, warung, mushola) dan fasilitas administrasi (kantor pengelola, syahbandar, bea cukai).

Beberapa parameter kapal yang harus diketahui terkait dengan daya dukung pelabuhan adalah [15]:

- a. *Gross Tonnage* (GT), besaran ini menyatakan jumlah isi (volume) ruang kapal secara keseluruhan dalam satuan *Registered ton*. $1GT = 100ft^3 = 2,83m^3$.
- b. *Sarat (Draft)*, yaitu bagian kapal yang berada di bawah permukaan air, terutama pada saat kapal bermuatan penuh (*over load*)
- c. *Panjang kapal (Length Over All/LOA)*, yaitu bagian terpanjang diukur dari haluan sampai buritan.
- d. *Lebar tengah kapal (Moulded Breadth)*, yaitu bagian tengah kapal yang paling lebar.

Dari beberapa parameter tersebut yang paling berpengaruh sangat nyata terhadap daya dukung pelabuhan perikanan adalah draft kapal. Ukuran kapal semakin besar maka akan membuat bagian kapal yang berada di dalam air (*draft*) menjadi semakin dalam dan draft maksimum terjadi pada saat kapal bermuatan penuh. *Draft* berpengaruh terhadap mobilitas kapal pada saat keluar dari pelabuhan maupun masuk ke pelabuhan, apabila kedalaman alur

pelayaran tidak sesuai dengan standard kebutuhannya.

2.3. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Juli hingga Agustus 2023 pada Pelabuhan Pusat Kajian Unggulan Daerah dan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PKUD-PPMP) Unpatti di Desa Hila, Maluku Tengah.

2.4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam Paper ini adalah Metode Diskriptif [16] yang bersifat Observasi. Selain itu juga dilakukan dokumentasi dan studi pustaka yang dilakukan untuk mempelajari teori-teori yang mendukung penelitian sehingga diharapkan dengan landasan teori yang kuat akan diperoleh pemahaman yang baik.

2.5. Metode Analisis Data

Soft System Methodology (SSM) sebagai sebuah langkah metodologis, pada dasarnya menawarkan pendekatan yang lebih bersifat *experienced-based knowledge*, artinya menekankan pada pentingnya penggalian informasi dan keinginan dari aktor-aktor di dunia nyata untuk kemudian dapat dirumuskan menjadi rekomendasi dalam rangka perbaikan atau peningkatan situasi problematis yang menjadi target penelitian [17]. Dengan kata lain, *Soft System Methodology* mampu untuk mengurai kompleksitas permasalahan dengan mengikuti prosedur dan tahapan analisis yang disediakan [18].

Menurut Checkland [19], *Soft System Methodology* dapat dilakukan melalui beberapa tahap yang terdiri dari tujuh tahap. Dalam Penelitian ini dilakukan 4 tahap pendekatan *Soft System Methodology*. Pendekatan *Soft System Methodology* juga menghasilkan model konseptual yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam memperbaiki sistem yang ada. [20]

Rincian dari masing-masing tahap sebagai berikut:

- tahap satu pemahaman situasi masalah
- tahap dua, pemaparan situasi masalah yang hasilnya digambarkan dengan *rich picture*
- tahap tiga, menetapkan *root definitions* untuk mengatasi permasalahan yang telah dirumuskan;
- tahap empat, membuat model konseptual berdasarkan *root definitions*.

Pengungkapan situasi masalah dilakukan berdasarkan observasi lapangan dan analisis data.

Analisis intervensi adalah proses identifikasi aktor-aktor yang ada dalam fakta lapangan yang akan menjadi rujukan, serta peran mereka dalam fakta lapangan. Analisis intervensi melibatkan aktor sebagai *client (C)*, *practitioner (P)*, dan *problem owner (PO)* [19]. Sementara itu, analisis sosial merupakan proses menganalisis peran, norma, dan nilai masing-masing aktor pada problem owner. Pengungkapan situasi masalah yang digambarkan dengan *Rich Picture*.

Root Definitions (RDs) ditetapkan untuk mengatasi permasalahan. Model konseptual RDs yang telah ditetapkan sebagai dasar untuk pembuatan model konseptual. Model konseptual yang dibuat untuk pengembangan Pelabuhan PKUD-PPMP Unpatti dibuat berdasarkan gagasan peneliti.

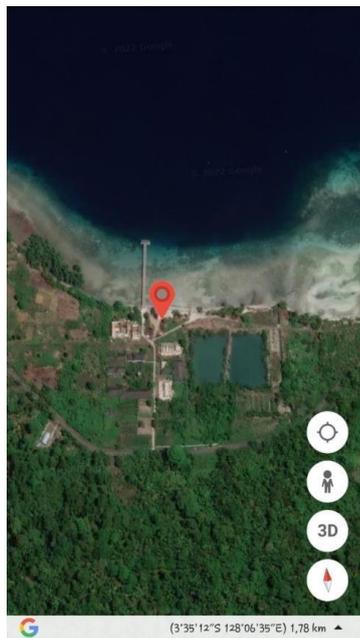
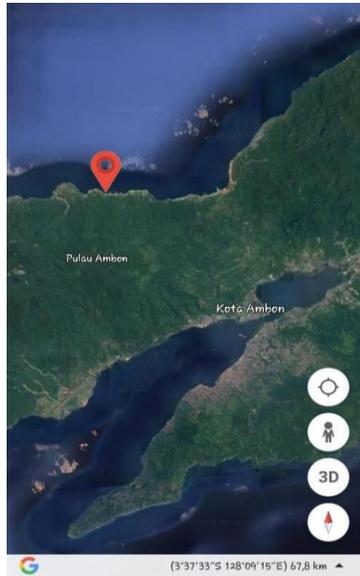
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Pelabuhan PKUD-PPMD

Pelabuhan pada Pusat Kajian Unggulan Daerah dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PKUD-PPMD) Unpatti terletak di Desa Hila. Adapun Desa Hila Terletak di pantai utara Pulau Ambon, di dataran rendah dan sedikit berbukit ke arah selatan menuju Negeri Hative Besar di Kota Ambon dan

berjarak sekitar 37 km dari pusat kota Ambon. Jumlah penduduk Desa Hila 1425 KK dan jumlah jiwa 6850. Presentasi pria dan wanita hampir seimbang yakni 55% - 45%.

- Tangki air bersih
- Lapangan Parkir
- Aula Pertemuan
- Jalan Pelabuhan
- Pagar Pelabuhan



Gambar 1. Lokasi Pelabuhan PKUD-PPMD

Fasilitas yang tersedia saat ini di Pelabuhan PKUD-PPMD antara lain :

- Dermaga
- Slipway
- *Bollar*
- Kolam Pelabuhan



Gambar 2. Beberapa Fasilitas Pelabuhan PKUD-PPMD

3.2. Pengungkapan Situasi Masalah

Permasalahan yang ada pada Pelabuhan PKUD-PPMD Unpatti khususnya pada permasalahan Fasilitas yaitu rendahnya tingkat pemanfaatan fasilitas seperti dermaga dan kolam pelabuhan. Keberadaan Nelayan lokal yang memanfaatkan Pelabuhan ini juga masih sangat minim, padahal banyak masyarakat Desa Hila yang berprofesi sebagai nelayan, namun nelayan Desa Hila lebih banya mendaratkan hasil tangkapan nya di pantai desa Hila. Hal itu terjadi antara lain disebabkan karena Fasilitas pendaratan pada Pelabuhan PKUD-PPMD yang masih kurang menunjang untuk mendaratkan hasil tangkapan, seperti *basket dan bollard* dermaga serta belum adanya penahan gelombang (*breakwater*) untuk keselamatan pada saat proses pendaratan ikan.

Pelabuhan PKUD-PPMD juga belum memiliki industri pengolahan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Jalan darat menuju lokasi Pelabuhan yang rusak parah. Hal ini juga menjadi penyebab masih kosongnya lahan pelabuhan untuk disewakan kepada pelaku usaha.



Gambar 3. Pengungkapan Situasi Masalah

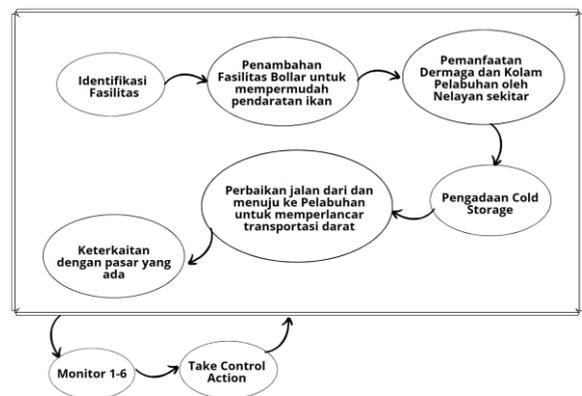
3.3. Root Definitions

Tahap penyusunan definisi permasalahan dan pembuatan model konseptual merupakan bagian tahap

berfikir sistem tentang dunia nyata pada pendekatan *Soft System Methodology*. Tahap penyusunan definisi permasalahan menghasilkan RDS yang merupakan cara menggambarkan sistem untuk membantu proses permodelan sistem pada tahap pembuatan model Konseptual. Adapun RDs yang dihasilkan yaitu Pengembangan dan Pengoptimalisasian Fasilitas dan Lahan Pelabuhan untuk industri serta penyediaan fasilitas melalui skema kerja sama dengan *stakeholder*. Menurut Ruswandi dan Dewi [21], salah satu penentu bagi pengembangan perekonomian di sekitar Pelabuhan yaitu investasi di sekitar Pelabuhan. Peluang usaha yang bisa dikembangkan pada lahan Pelabuhan adalah pabrik *Cold Storage* yang belum tersedia, unit pengolahan, serta *dock yard/slip way*.

3.4. Model Konseptual

Hasil model konseptual pada pengembangan Pelabuhan PKUD-P2MD Unpatti dibuat berdasarkan RDs, yang terlihat pada Gambar 2 berikut ini :



Gambar 4. Model Konseptual

Berdasarkan keseluruhan hasil Penelitian dapat direkomendasikan model Pengembangan Pelabuhan PKUD yang menitik beratkan pada :

- Penambahan Fasilitas *Bollard* untuk mempermudah pendaratan Ikan,

- Pemanfaatan Dermaga dan kolam Pelabuhan oleh Nelayan sekitar Pelabuhan,
- Pengadaan Fasilitas *Cold Storage*,
- Perbaikan Jalan dari dan Menuju Pelabuhan untuk memperlancar Transportasi Darat,
- Membuka jalur-jalur keterikatan dengan pasar yang ada.

4. SIMPULAN

Dari hasil Observasi Lapangan diperoleh bahwa Fasilitas-fasilitas yang tersedia saat ini antara lain Dermaga, Slipway, *Bollar*, Kolam Pelabuhan, Tangki air bersih, Lapangan Parkir, Aula Pertemuan, Jalan Pelabuhan, Pagar Pelabuhan. Pengembangan Pelabuhan PKUD-PPMD Unpatti perlu dilakukan dengan mengembangkan Fasilitas Pelabuhan serta mengoptimisasikan Lahan Pelabuhan untuk meningkatkan produksi perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] *Kepmen KP No. 50/KEPMEN-KP/2017*. 2017.
- [2] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020*. p. Bab III/Bagian Keempat/Paragraf 2.
- [3] E. S. W. Aprilia Syah Putri, Iin Solihin, “Strategi Optimalisasi Fungsi Pelabuhan Perikanan Dalam Pemasaran Hasil Tangkapan Di PPP Lempasing,” *ALBACORE J. Penelit. Perikan. Laut*, vol. 1, no. 2, pp. 171–183, 2018.
- [4] *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no PER.08/MEN/2012*. 2012.
- [5] *Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP. 02/MEN/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan Ikan*. 2002.
- [6] K. Fazri, I. Solihin, and Mustaruddin, “Fasilitas Dan Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh,” *ALBACORE J. Penelit. Perikan. Laut*, vol. 5, no. 1, pp. 007–016, 2021, doi: 10.29244/core.5.1.007-016.
- [7] G. Sinaga, V. A. Rosyid, and B. Wibowo, A, “Optimalisasi Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Dasar Dan Fungsional Di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Dalam Menunjang Kegiatan Penangkapan Ikan,” *J. Fish. Resour. Util. Manag. Technol.*, vol. 2, no. 1, 2013.
- [8] “Pemerintah Negeri Hila.” https://hila.desa.id/index.php?act=da ta_umum.
- [9] N. Sari *et al.*, “Peningkatan Penanganan Ikan Hasil Tangkapan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu,” *J. Pus. Inov. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 80–84, 2020.
- [10] Hidayatullah, “SSM Sebuah Pendekatan Holistik untuk Kegiatan Aksi (Learning For Action),” *J. Sociol. Islam*, vol. 1, pp. 109–116, 2011.
- [11] J. Zain, “Studi Tata Letak Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur,” *Repos. Univ. Riau*, 2013.
- [12] E. Lubis, *Pelabuhan Perikanan. Indonesia: Penerbit IPB Press*, 2012.
- [13] *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021*. .
- [14] E. Lubis, *Pengantar Pelabuhan Perikanan*. Bogor: Laboratorium Pelabuhan Perikanan Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perairan dan Ilmu kelautan Institut Pertanian Bogor, 2002.
- [15] S. K. Elfandi, *Administrasi Pelabuhan Perikanan*. 2011.
- [16] A. Syahza, *Metodologi Penelitian*.

- UR PRESS ISBN: 978-623-255-107-7, 2021.
- [17] S. Hardjosoekarto, *Soft System Methodology (Metodologi Serba Sistem Lunak)*. Universitas Indonesia Press, 2012.
- [18] T. Sirmareza, “Aplikasi Soft System Methodology Dalam Analisis Diplomasi Angkatan Laut Melalui Pengiriman Satgas Maritim TNI Pada Misi UNIFIL MTF,” *Glob. J. Polit. Int.*, vol. 19, no. 1, 2017.
- [19] P. J. Checkland P, *Learning for Action: A Short Definitive Account of Soft System Methodology and its use for Practitioners*. England: John Wiley and Sons, Ltd, 2006.
- [20] W. H. A. Rahmah, Nurani WT, “Management Of Troll Fisheries with Fish Agregating Pondokdadap Sendang Biru, Malang,” *J. Teknol. Perikan.*, vol. 4, pp. 73–88, 2013.
- [21] D. G. Ruswandi A., “Strategi Pengembangan Investasi di Sekitar Pelabuhan Perikanan Tipe B di Jawa Barat,” *J. Akuatika*, vol. 4, pp. 89–101, 2013.